

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara agen dan prinsipal. Agen disini adalah manajemen yang mengelola perusahaan, sedangkan prinsipal adalah pemegang saham atau investor. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan bahwa ada tanggung jawab yang timbul dari hubungan kontrak antarpinsipal dan agen. Kedua belah pihak tentu menginginkan hasil yang menguntungkan dirinya. Teori keagenan mengasumsikan bahwa agen yang mengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi internal dan memiliki hak pengendalian atas perusahaan.

Sedangkan, prinsipal hanya mengawasi dan mengamati tindakan yang dilakukan oleh agen. Menurut Jensen dan Meckling (1976), pemisahan kepemilikan dan pengendalian inilah yang akhirnya dapat menyebabkan konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Teori keagenan (*agencytheory*) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

Prinsipal tidak mungkin terus-menerus memonitor setiap tindakan yang dilakukan agen. Oleh karena itu, agen perlu memberikan informasi misalnya berupalaporan keuangan kepada prinsipal secara

rutin dan transparan. Namun dalam beberapa kasus agen menjadi lebih oportunistik dengan tidak melaporkan keadaan atau kondisi yang sebenarnya kepada seluruh prinsipal. Menurut Suyudi (2009). apabila perusahaan berada dalam kinerja buruk, manajer dapat bertindak oportunis dengan menaikkan laba akuntansi untuk menyembunyikan kinerja buruk tersebut. Begitupun sebaliknya ketika perusahaan dalam kinerja baik manajemen akan menurunkan laba untuk menunda kinerja yang baik. Kondisi seperti inilah yang dinamakan asimetri informasi.

Adanya asimetri informasi antara agen dengan prinsipal memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba. Semakin tinggi asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal) maka semakin tinggi pula kemungkinan manajemen untuk merekayasa laporan keuangan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Eisenhardt (1989) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

- (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),
- (2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan
- (3) Manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*)

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba telah mengakibatkan informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan, netral, komprehensif, serta mempunyai daya banding dan daya uji. Banyak perusahaan di dunia yang bahkan seolah-olah telah menjadikan manajemen laba sebagai salah satu budaya dalam perusahaannya. Manajemen laba tidak hanya terjadi di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, namun terjadi juga pada perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata seperti halnya Amerika Serikat (Sulistyanto Sri, 2008).

Menurut Schipper (1989), manajemen laba adalah proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal yang di dalamnya ada campur tangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Rekayasa laba ini juga disebutkan banyak digunakan untuk mengelabui *stakeholder* atau pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk mengelabui atau mencurangi *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu (Healy dan Wahlen, 1999).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sulistyanto Sri (2008) yang mendefinisikan manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja keuangan.

Menurut Iraya, Mwangi, and Muchoki (2015), manajemen perusahaan juga sengaja menggunakan manajemen laba sebagai strategi untuk memanipulasi pendapatan perusahaan dengan maksud agar angka yang telah diperoleh akan sesuai target yang telah ditentukan. Laporan keuangan yang telah direvisi dianggap tidak layak dianggap sebagai media pertanggungjawaban manajer kepada pemiliknya karena informasi-informasi yang terkandung disesuaikan dengan kepentingan manajer. Aktivitas ini tidak hanya memberikan dampak negatif kepada pemilik saja tetapi juga merugikan pihak lain yang menggunakan informasi keuangan tersebut (Jao Robert, 2011). Pihak lain yang dirugikan karena adanya praktik manajemen laba antara lain calon investor, kreditur, *supplier*, regulator, dan *stakeholder* lainnya.

Manajer memiliki kebebasan dalam memilih metode akuntansi yang dipakai untuk melakukan praktik manajemen laba. Kemudian, untuk menerapkan metode tersebut ada beberapa pola manajemen laba yang biasanya dilakukan oleh manajer tanpa harus melanggar prinsip akuntansi, yaitu:

1. Peningkatan Laba (*Income Increasing*)

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya.

2. Penurunan Laba (*Income Decreasing*)

Upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya.

3. Perataan laba (*Income Smoothing*)

Upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

Mengutip dari penelitian Sulistyanto Sri (2008) terdapat 3 motivasi utama manajer dalam melakukan manajemen laba, yakni:

1. *Bonus Plan Hypothesis*

Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya berada di bawah syarat untuk memperoleh bonus, maka manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai tingkat minimal untuk memperoleh bonus.

Sebaliknya, jika pada tahun tersebut kinerja yang diperoleh manajer jauh di atas jumlah yang disyaratkan untuk memperoleh bonus, manajer akan mengelola dan mengatur agar laba yang dilaporkan (*reported earnings*) menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba sesungguhnya dengan laba yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya.

Upaya ini membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke periode. Oleh karena itu, bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga memotivasi manajer untuk melakukan

kecurangan manajerial.

2. *Debt (equity) hypothesis*

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya.

Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya. Meski permainan ini sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan (*timing*) kewajiban, namun hal ini telah mengakibatkan semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh informasi yang keliru dan membuat keputusan bisnis menjadi keliru pula. Akibatnya, terjadi kesalahan dalam mengalokasikan sumber daya.

3. *Political cost hypothesis*

Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, anti-trust dan monopoli, dan sebagainya. Perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mengecilkan atau memperbesar laba yang dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan cenderung melanggar regulasi pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Apa yang dilakukan perusahaan-perusahaan ini sebenarnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa manajemen laba akan dilakukan pada saat perusahaan menghadapi *intertemporal choice* yaitu situasi yang memaksa perusahaan melakukan manajemen laba.

Ketiga hipotesis ini sebenarnya merupakan sisi lain dari teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan wewenang pengelolaan perusahaan dari pemilik kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan perusahaan dengan lebih baik. Walaupun para peneliti terdahulu menafsirkan manajemen laba dalam istilah yang berbeda, namun semuanya menarik kesimpulan sama yang menyepakati bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan

keuangan.

2.1.3 Good Corporate Governance

Corporate governance adalah konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nasution dan Setiawan, 2007). Hal serupa diungkapkan oleh Sutedi (2012) yang mengasumsikan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan pertanggungjawaban perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Perusahaan dan seluruh *stakeholder* dapat menjadikan *corporate governance* sebagai pedoman untuk mengendalikan dan mengarahkan Perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan dan menguntungkan seluruh pihak dalam jangka panjang. *Stakeholder* disini termasuk semua pihak dari dewan direksi, manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat.

Sulistyanto Sri (2008) mendeskripsikan *corporate governance* sebagai upaya untuk mengeliminasi manajemen laba dalam pengelolaan dunia usaha. Kunci utama keberhasilan *GCG* adalah dengan mewujudkan keseimbangan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan.

Keseimbangan akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi. Watts (2003) memperkirakan *corporate governance* dapat memonitor masalah kontrak dan digunakan sebagai salah satu cara untuk membatasi perilaku oportunistik manajemen. Menurut *Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* dalam *Corporate Governance Perception Index* (2008), manfaat dari *good corporate governance (GCG)* yaitu meminimalkan *agency cost*, meminimalkan *cost of capital*, meningkatkan nilai saham perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan.

Corporate governance mengacu pada sistem, prinsip-prinsip dan prosedural mana sebuah perusahaan diatur (Kausalya et al., 2013). Berikut prinsip-prinsip pokok yang seharusnya diterapkan dalam setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab.

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga kejujuran dalam berbisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi perusahaan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi penting untuk pengambilan keputusan

oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat memberikan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerjanya secara transparan dan wajar sehingga pelaksanaan perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip ini, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem akuntansi yang diterima secara umum dan menjamin adanya laporan keuangan serta pengungkapan yang berkualitas. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasi manajemen (*management information system*) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh komisaris dan manajer.
- b. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.

- c. Mengumumkan jabatan yang kosong, agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara-cara yang kolusif atau nepotisme

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi dan menyesuaikan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen dan profesional tanpa benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, segala hak-hak pemegang saham dan pemangku kepentingan harus terus diperhatikan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat beberapa proksi dalam mekanisme *corporate governance* yang sering digunakan oleh peneliti untuk mengetahui pengaruhnya terhadap manajemen laba yaitu kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen.

2.1.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking (Aygün et al. 2014 dan Agustia., 2013). Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimiliki pihak luar perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen, sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan manajemen

Apabila saham yang dimiliki oleh investor institusional besar, maka investor institusional juga akan tertarik untuk mengumpulkan informasi, mengawasi dan mendorong kinerja manajemen perusahaan agar lebih baik. Oleh karena itu, kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen. Pengawasan oleh investor institusional tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan (*insider board*) baik itu dewan direksi maupun komisaris dalam suatu perusahaan diluar saham yang dimiliki oleh para prinsipal, masyarakat dan institusional (Anggana et al., 2013). Besar kecilnya kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang berbeda yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005).

2.1.6 Dewan Komisaris Independen

KNKG (2006) mengartikan dewan komisaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris independen dipilih langsung oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau pemegang pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Rahmawati, 2013). Dewan komisaris dapat membentuk komite dalam pelaksanaan tugasnya, nantinya usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /Pojk.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, untuk perusahaan yang memiliki lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris maka perusahaan tersebut juga wajib memiliki Komisaris Independen paling kurang 30% (Tiga Puluh Persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Semua Dewan Komisaris juga memiliki kedudukan yang sejajar termasuk komisaris utama. Pada intinya, komisaris independen merupakan suatu mekanisme independen (netral) untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Pengawasan dan pengendalian dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan oleh pihak yang independen (Sulistyanto Sri, 2008).

Tugas dari dewan komisaris yang dirumuskan oleh FCGI, antara lain :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan

dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor atau mengawasi penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu
5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan
6. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.
7. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu
8. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan

2.1.7 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk meraih laba. Profitabilitas juga menjadi faktor penting yang harus dicari dalam sebuah perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka akan semakin besar pula aset yang dimiliki perusahaan. Kepemilikan aset yang besar akan menarik perhatian investor untuk melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut.

Harahap (2009) mendefinisikan profitabilitas sebagai kapabilitas perusahaan dalam mendapatkan laba dengan memanfaatkan semua kemampuan, dan sumber yang ada. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas. Evaluasi kinerja tersebut dihubungkan terhadap penjualan aktiva, modal atau nilai saham (Barlian dan Sundjaja, 2013). *Return On Assets* (ROA) adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola laba berdasarkan aset yang digunakan.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Purnama Dendi (2017)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan	-Pendekatan Kuantitatif -Analisis Linear Berganda - <i>Purposive Sampling</i> Pada Perusahaan	-Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba. -Ukuran Perusahaan Berpengaruh	-Tahun penelitian -Variabel Independen adalah kepemilikan manajerial,
		Manajerial Terhadap Manajemen Laba	Manufaktur Yang Secara Berturut- Turut Terdaftar Di BEI Tahun 2010 Sampai 2015	Negatif Terhadap Manajemen Laba. -Kepemilikan Institusional Dan Leverage Tidak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.	kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan

2	Astari Ratih (2017)	Faktor- Faktor Yang Mempengaru hi Manajemen Laba	-Pendekatan Kuantitatif -Analisis Regresi Linear Berganda -Purposive Sampling Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012- 2015	-Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Dan Signifikan Pada Manajemen Laba. -Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Pertumbuhan Penjualan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Pada Manajemen Laba	-Tahun penelitian -Variabel Independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan
---	------------------------	--	--	--	---

3	Purnama and Nurdiniah (2019)	<i>Profitability, Firm Size, And Earnings Management : The Moderating Effect Of Managerial Ownership</i>	-Pendekatan Kuantitatif -Analisis Regresi Berganda -Purposive Sampling Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2012-2016	-Profitabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba -Ukuran Perusahaan Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba -Kepemilikan Manajerial Tidak Terbukti Mampu Memperkuat Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba	-Tahun Penelitian -Tidak menggunakan moderasi -Variabel Independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan
---	------------------------------	--	--	--	--

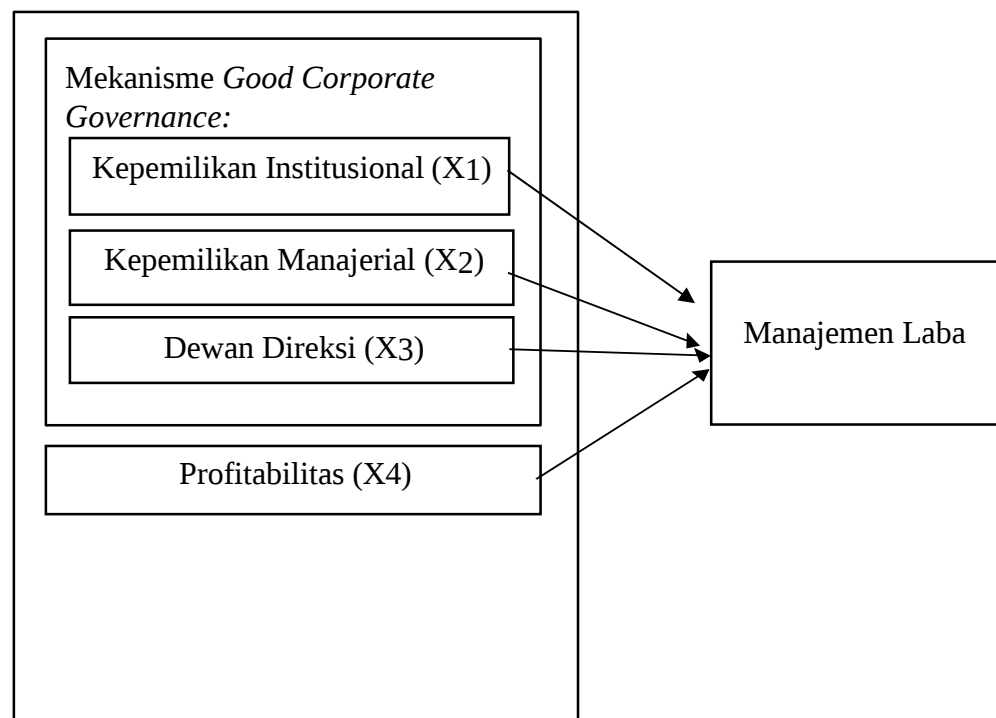
4	Putri Sartika Anandha (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Praktik Manajemen Laba Perusahaan	-Pendekatan Kuantitatif -Data Panel Dengan Analisis Regresi Linear Berganda -Fokus Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, Dan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018	-Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Manajemen Laba -Dewan Komisaris Independen Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba.	-Tahun Penelitian -Variabel Independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan
5	Rahmawati and Fajri (2021)	<i>Firm Size, Leverage, Dividend Policy, Ownership</i>	-Pendekatan Kuantitatif -Analisis Regresi	-Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan Kepemilikan Manajerial	-Tahun Penelitian

		<i>Structure, Earning Management : Evidence In IndonesiaStock Exchange</i>	Linear Bergand a -Purposive Sampling Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2018	Berpengaruh Positif Terhadap Manajemen Laba -Kebijakan Dividen, Kebijakan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Manajemen Laba	-Variabel Independen adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, profitabilitas, <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan
--	--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penggambaran hubungan antar variabel yang ingin diuji atau dianalisis melalui penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti akan menguji pengaruh *good corporate governance*, profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan *real estate* yang terdaftar di BEI untuk periode 2019-2022. *Good Corporate Governance* pada penelitian ini diproksikan menjadi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan direksi. Adapun penggambaran kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki institusi. Pengaruh yang diberikan kepemilikan institusional sangat penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen serta pemegang saham. Menurut Astari Ratih (2017), kepemilikan institusional mempunyai hubungan negatif dengan manajemen laba.

Tingginya kepemilikan institusional akan meningkatkan monitoring terhadap kinerja manajemen sehingga hal tersebut dapat membatasi tindakan manajemen yang bersifat menguntungkan dirinya sendiri. Pengendalian portofolio investasi oleh investor manajerial dianggap lebih profesional sehingga kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang dimanipulasi lebih kecil karena investor institusional memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba (Sumanto, 2014).

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Menurut Anggana et al. (2013), kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh manajer perusahaan baik itu dewan direksi maupun komisaris dalam suatu perusahaan diluar saham yang dimiliki oleh para prinsipal, masyarakat dan institusional.

Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen maka akan membuat semakin tinggi pula kemungkinan praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Sartika Anandha (2020) dan Rahmawati and Fajri (2021) yang berpendapat bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi membuat manajer memilikiposisi kuat untuk melakukan pengendalian terhadap perusahaan sehingga peluang untuk melakukan manajemen laba juga akan semakin tinggi. Seorang manajer juga mengelola laba untuk menciptakan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham (*stakeholders*) perusahaan yang dikelolanya.

Hal ini sejalan dengan teori agensi yang menegaskan bahwa kewenangan yang diterima manajer dari pemilik perusahaan untuk mengelola dan menjalankan perusahaan membawa konsekuensi logis yang harus dijalankan manajer dan pemilik perusahaan.

Manajer mempunyai kewajiban untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik serta mempunyai hak untuk menerima penghargaan atas apa yang telah dilakukannya R.Agusti (2009).

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.3.3 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau pemegang pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Rahmawati, 2013). Minimal dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah 30% dari seluruh total dewan komisaris yang ada.

Penelitian oleh Putri Sartika Anandha (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba yang berarti bahwa banyaknya anggota komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan. Hal yang sama dikemukakan oleh Sumanto (2014), banyaknya dewan komisaris dalam sebuah perusahaan mampu mencegah tindakan manajemen laba yang bersifat oportunistik dikarenakan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang tidak lain adalah sebagai pengawas.

Semakin banyak dewan komisaris maka tingkat pengawasannya juga akan semakin luas sehingga hal tersebut menambah keyakinan bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan seluruh

pihak dan tentu saja akan menarik banyak investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin sedikit dewan komisaris maka akan semakin besar praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Perusahaan akan banyak didominasi oleh pihak manajemen apabila dewan komisarisnya sedikit.

H3: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari profitabilitas yang dihubungkan terhadap penjualan aktiva, modal atau nilai saham (Barlian dan Sundjaja, 2013). Menurut Purnama Dendi (2017), profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Manajemen perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara *income minimization* (minimisasi laba) yang bertujuan untuk memperkecil kewajiban perusahaan, maupun dengan *income maximization* (maksimisasi laba) yang dimaksudkan untuk memaksimalkan bonus manajer, menciptakan kinerja baik perusahaan, menunda pelanggaran perjanjian utang serta untuk kepentingan manajer atas pengendalian terhadap perusahaan. Tingkat profitabilitas yang terlalu tinggi di masa kini dapat mempengaruhi

peluang penurunan profitabilitas di masa depan.

Penurunan profitabilitas di masa depan dapat membuat perusahaan mengalami fluktuasi pendapatan yang menyebabkan ketidakstabilan perusahaan dalam memperoleh pendapatan, maka tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap juga dapat mendorong terjadinya praktik laba dengan tujuan menjaga kestabilan dalam pengambilan keputusan perusahaan (Purnama and Nurdiniah, 2019). Penelitian oleh Astari Ratih (2017) juga menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba.

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba